

## Polda Jateng Beri Informasi Objektif

**SEMARANG (KR)** - Polda Jateng berkomitmen untuk memberikan informasi secara objektif untuk masyarakat. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutrisna pada acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-69 Humas Polri, Senin (2/11) di Aula Mapolda Jateng Jalan Pahlawan Semarang. Acara syukuran di tengah pandemi Covid-19 berlangsung sederhana sekaligus diisi kegiatan menyanyikan launching tanda korpus Humas Polri secara virtual bersama Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono.

"Kami menyadari sebagai Humas menjadi etalase nya Polri jadi corongnya pimpinan jadi kita harus bisa memberikan informasi objektif pada masyarakat," tuturnya. Sebelumnya dalam menyambut HUT ke-69 Humas Polri yang jatuh 30 Oktober bertepatan dengan Semangar Profesionalie Humas Polri Siap Mewujudkan Kamtibmas yang Produktif untuk Masyarakat Semakin Produktif telah menggelar berbagai kegiatan, salah satunya bakti sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. (Cry)

## Sosialisasi Tblantas di Tengah Pandemi

**GROBOGAN (KR)** - Tidak hanya kepada para pengendara yang melintas di jalan raya, sosialisasi tertib berlalu lintas (tblantas) dalam rangka Operasi Keselamatan Candi Zebra 2020 yang dilakukan Polres Grobogan sasarannya juga kepada warga yang tengah mengurus surat izin mengemudi (SIM) di Kantor Satlantas setempat. "Kami memanfaatkan momen para pemohon SIM yang sedang menunggu proses pembuatan SIM. Kegiatan preemtif dan preventif ini kami lakukan dalam rangka Operasi Keselamatan Candi Zebra 2020. Tujuannya agar mereka tetap bisa menjaga ketertiban dalam berkendara di tengah pandemi Covid-19," kata Kanit Regident Satlantas Polres Grobogan, Iptu Joko Susilo, Kamis (5/11) di Kantor Satpas SIM. Wejangan yang diberikan, antara lain, agar tertib menggunakan protokol kesehatan saat melakukan perpanjangan maupun pembuatan SIM baru. (Tas)



KR-M Taslim

**Petugas Satlantas Polres Grobogan memberi pengarahan tentang aturan berlalu lintas di tengah pandemi Covid-19.**

## Unwidha Gelar Diklat Penguatan Kepala Sekolah

**KLATEN (KR)** - Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten mendapatkan kepercayaan dari pemerintah menyelenggarakan diklat penguatan kepala sekolah.

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Unwidha, Dr Tukiyo MPd, Rabu (4/11) mengemukakan, Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2020 terdiri 142 kepala sekolah TK, SD dan SMP yang berasal dari 3 kabupaten yaitu Klaten, Sukoharjo dan Wonogiri.

Dari 142 orang rinciannya 114 orang Kepala TK, 19 orang Kepala SD dan 9 orang Kepala SMP. Pengajar diklat berasal dari hibah LPPKSPS 3 orang dan 5 orang dosen Unwidha, yang semuanya telah mengikuti bimtek sebagai Tenaga Pengajar Diklat.

"Dengan diselenggarakan

diklat, diharapkan para kepala sekolah dapat meningkatkan kompetensinya, menciptakan sekolah merdeka dan capaian belajar peserta didik serta mewujudkan students wellbeing. Kegiatan diklat Unwidha pada OJT 1 dilaksanakan secara daring, IST secara tatap muka virtual, dan OJT 2 secara daring. Diklat telah dimulai tanggal 27 Oktober dan akan berakhir tanggal 20 November 2020 mendatang," kata Dr Tukiyo.

Rektor Unwidha Prof Dr Triyono MPd ketika menyampaikan materi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa pelaksanaan diklat tahun ini berbeda dengan tahun lalu.

"Setidaknya ada 8 perbedaan pelaksanaan diklat tahun ini dengan tahun lalu, yaitu ditinjau dari tujuan diklat, penyelenggara diklat,

pola diklat, model pembelajaran, materi pembelajaran, pelaksanaan supervisi, dan penyiapan SDM diklat," jelas Triyono.

Diklat dilaksanakan dengan pola on the job training 1 (10 JP), in service training

(40 JP), dan on the job training 2 (21 JP), total 71 JP.

Materi diklat berdasarkan pada masalah pembelajaran di sekolah dan mengarahkan kemampuan menemukan solusi, dengan model pembelajaran yang

berorientasi pada pengalaman nyata, berpusat pada peserta melalui penerapan model observe, reflect, plan, act, evaluate, reflect (or-paer) dan introduction, link, enforcement, awareness, development (ilead). (Sit)



KR-Sri Warsiti

**Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Purwo Haryono MHum, Prof Dr Triyono, dan Dr Tukiyo MPd.**

## PENGUATAN KAPASITAS GURU DAN SISWA

# Anak Sekolah Rentan Terdampak Bencana

**PURWOREJO (KR)** - Anak-anak sekolah dinilai menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap dampak bencana alam. Terlebih seperti di Kabupaten Purworejo yang merupakan daerah rawan terhadap berbagai bencana alam.

Selama ini Purworejo dikenal sebagai daerah yang sering terkena musibah tanah longsor dan banjir. Terkait hal itu, Pemkab Purworejo menganggap perlu dilakukannya langkah-langkah antisipasi agar bencana alam tersebut tidak menyebabkan jatuhnya korban.

"Di sisi lain kelompok ini memiliki potensi yang besar sebagai agent of information seputar usaha-usaha pengurangan risiko bencana, termasuk kepala sekolah

dan para guru," kata Ilmuwan bidang pendidikan kebencanaan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) Dr Tuswadi, Kamis (5/11). Disebutkan, bahwa peran guru sangat besar dalam memberi pemahaman kepada siswa mengenai bagaimana menyikapi terjadinya bencana alam.

Dalam Scientist Goes to School atau ilmuwan bertemu siswa dan guru di SMP Negeri 22 Purworejo yang dibuka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

(Disdikpora) Purworejo Sukmo Widi Harwanto SH MM ini, Tuswadi yang juga pakar ilmu kebencanaan dari Universitas Hiroshima ini menandakan, bahwa sekolah wajib membangun dirinya menjadi lembaga pendidikan yang aman bencana melalui pendidikan kebencanaan secara berkesinambungan. "Kepala sekolah dan guru sebagai garda terdepan implementasi sekolah aman bencana, wajib ditingkatkan kapasitasnya," tambahnya.

Dijelaskan pula bahwa terkait kebutuhan peningkatan kapasitas kebencanaan ini, ALMI dan Waku Pro Research Centre Hiji-yama University Hiroshima Jepang menyelenggarakan kegiatan Scientist Goes to School dalam

bentuk seminar kebencanaan. Acara tersebut dimaksudkan untuk memberi pengertian dan pemahaman tentang bagaimana memahami dan menyikapi berbagai bentuk bencana, terutama yang disebabkan oleh faktor alam.

Selain itu juga hadir sebagai narasumber pakar kebencanaan dari Waku Pro Research Centre Dr Fujikawa Yoshinori serta ahli penanganan medis dari Rumah Sakit Islam Banjarnegara dr Agus Ujianto. Pada kegiatan ini pakar ilmu kebencanaan dari ALMI dan Waku Pro Research Centre berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan para kepala sekolah, guru, dan siswa terkait mitigasi bencana serta pengurangan risikonya. (Nar)

# Pilkada Jangan Sampai Munculkan Klaster Covid Baru



**PEMILIHAN** Kepala Daerah (Pilkada) sudah diputuskan akan dilaksanakan pada Desember secara serentak di seluruh Indonesia. Meski saat ini Bangsa Indonesia sedang dicekam oleh pandemi covid-19, namun pemerintah tetap memutuskan untuk tidak menunda pelaksanaan Pilkada langsung di sejumlah provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dengan keputusan tersebut, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Masruhan Samsurie, yang juga selaku Ketua FPP DPRD Jawa Tengah dan Ketua DPW PPP Jawa Tengah, mengingatkan kepada penyelenggara Pilkada agar ekstra hati-hati. Jangan sampai Pilkada yang notabene sebagai pesta demokrasi di daerah untuk memilih pemimpinnya, justru bisa menjadi klaster baru covid.

Untuk itu, KPU selaku penyelenggara Pilkada, harus menerapkan aturan protokol kesehatan di semua tahapan Pilkada, termasuk saat kampanye dan saat pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS). Masruhan melihat ada sejumlah tahapan yang masih teresa yang harus menjadi perhatian, yaitu tahapan kampanye yang saat ini sedang berjalan, dan tahapan pencoblosan.

"Saya khawatir jika KPU lengah dalam dua tahapan Pilkada yang krusial ini, dua tahapan tersebut dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru covid. Untuk itu saya minta kepada KPU agar benar-benar ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Bahkan jika perlu KPU bisa memberi sanksi tegas kepada calon kepala daerah yang melanggar aturan protokol kesehatan," tegas Masruhan.

Tidak hanya KPU yang harus ekstra hati-hati dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang di Jawa Tengah

akan dilakukan di 21 Kabupaten/Kota. Menurut Masruhan, peranan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga sangat menentukan kelancaran Pilkada serentak tanpa menimbulkan klaster baru covid.

Jika pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu lemah, dikhawatirkan pada tahapan kampanye yang saat ini masih berlangsung, akan muncul banyak pelanggaran yang menimbulkan kerumunan massa. Jika calon kepala daerah melakukan kampanye dengan melakukan tatap muka langsung atau melakukan pengumpulan massa, hal itu berpotensi untuk menciptakan klaster baru.

"Panwaslu atau Bawaslu memiliki peranan sangat menentukan terhadap jalannya Pilkada yang bebas dari klaster baru covid. Untuk itu dibutuhkan ketegasan dari Panwaslu agar tidak terjadi pelanggaran khususnya yang

Menurut Masruhan, dari pantauan ke sejumlah KPU di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang akan menyelenggarakan Pilkada, persiapan sudah cukup bagus, termasuk dalam hal penerapan protokol kesehatan. Seperti pantauan yang dilakukan di Sukoharjo. KPU di Sukoharjo sudah melakukan persiapan secara matang, termasuk sudah menyiapkan penerapan protokol kesehatan di semua TPS yang ada.

Koordinator Divisi Informasi & Dokumentasi KPU Kabupaten Sukoharjo, Cecep, mengatakan, pihaknya sudah melakukan penanganan khusus dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di masa New Normal (adaptasi kebiasaan baru). Salah satunya dengan menyediakan bilik khusus bagi yang reaktif Covid-19.

"Bilik khusus itu nantinya akan disaksikan oleh pihak bawaslu. Untuk ketentuannya, kami masih menunggu

tangan dari plastik terutama kepada pemilih. Setiap pemilih akan diberi sarung tangan untuk sekali pakai saat pencoblosan," tutur Cecep.

Anggota Komisi A lainnya, Soetjipto mengatakan, Pilkada kali ini berbeda dengan Pilkada pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk Pilkada dimasa pandemi ini, KPU menjadi kunci berhasil atau tidaknya Pilkada serentak yang akan datang. Ia berharap pilkada ini tidak memunculkan klaster baru kasus Covid-19, karena persoalannya yang dilematis.

"Gambarannya secara teknis, bagaimana KPU mensikapi dan mensiasati persoalan itu. Di beberapa tempat melalui media sosial muncul pandangan-pandangan misalnya coblosan dilakukan secara giliran, misalnya jam ini RW ini, jam ini RW itu, dan seterusnya. Bahkan, diadakan Kotak Suara Keliling, yaitu di zona-zona yang dianggap masih merah.



KR-Budiono

**Masruhan Samsurie**

penyelenggara Pilkada dan pengawas Pilkada bisa bekerja secara maksimal untuk suksesnya gelaran Pilkada di Jawa Tengah, dan tidak meninggalkan persoalan baru seperti munculnya klaster covid baru. Kuncinya menurut Soetjipto, KPU harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan Panwaslu harus tegas dalam melakukan pengawasan.

Anggota Komisi A lainnya, Romli Mubarak mengatakan, standar persiapan Pilkada harus terpenuhi semua, yang didukung dengan penerapan protokol kesehatan. Romli menyarankan semua petugas KPPS bisa menjalani rapid test untuk memastikan tidak ada petugas KPPS yang terpapar covid 19.

"Pilkada serentak kali ini memang harus ekstra hati-hati dalam pelaksanaannya, karena berbarengan dengan pandemi covid 19 yang cukup meresahkan. Untuk itu, dalam pelaksanaan setiap tahapannya harus tegas dan tidak boleh terjadi pelanggaran. Panwaslu harus memainkan perannya secara optimal dan berani menindak siapa saja yang melanggar aturan Pilkada," tegas Romli.

Masruhan Samsurie juga berharap masyarakat berperan aktif dalam pengawasan jalannya semua tahapan Pilkada. Menurut Masruhan, justru pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sangat efektif. Masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran, bisa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu agar bisa segera ditindaklanjuti. (Adv/Budiono)



KR-Budiono

**Masruhan Samsurie saat dialog parlemen DPRD Jawa Tengah membahas "tantangan Pilkada Serentak di masa pandemi."**

terkait dengan kerumunan massa. Panwaslu harus berani menindak calon kepala daerah yang melanggar," tegas Masruhan.

bimbingan teknis dari KPU RI. Kemudian, dalam rangka untuk mencegah penyebaran covid, kami akan memberikan alat khusus perlindungan seperti sarung

Saya juga berharap pada 9 Desember 2020 nanti problem pandemi Covid-19 sudah berkurang," tutur Soetjipto.

Masruhan dan Soetjipto berharap